



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan humas dalam suatu organisasi atau lembaga adalah sebuah indikasi bahwa humas memiliki peran yang penting dalam perputaran sistem yang ada pada manajemen dan lembaga atau organisasi. Keberadaannya mampu menyentuh dan menerobos aspek sosial dan kepentingan publik, selalu menampilkan sesuatu yang positif dalam wujud citra yang positif demi kepentingan lembaga, membangun citra yang positif ditengah masyarakat ditentukan oleh apa yang diberikan dan yang ditampilkan perusahaan. Hal ini merupakan indikasi dari proses terbentuknya citra positif dan negatif.

Humas merupakan metode ilmu komunikasi sebagai salah satu kegiatan yang mempunyai kaitan dengan suatu organisasi. Oleh sebab itu ada bentuk yang dilihat terkait dengan kegiatan, serta diklasifikasikan kedalam dua bentuk, internal (karyawan, pemegang saham, manajer, direktur dan lain sebagainya) dan eksternal publik, yaitu orang yang berada diluar organisasi yang jelas mempunyai kaitan kepentingan yang diharapkan memiliki kaitan kepentingan dalam rangka menjalin hubungan baik. Fungsi utama Humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/instansi dengan publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dengan upaya menciptakan motivasi dan partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini public) yang menguntungkan.

Institusi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (BPPMKB) adalah merupakan hasil restrukturisasi (penggabungan) dua Satuan Kerja yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Pekanbaru yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2008 BPMKB Kota Pekanbaru terjadi restrukturisasi dengan penambahan unsur

Pemberdayaan Perempuan dengan nama instansi yang baru Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008.<sup>1</sup>

Setelah mengkaji kurang lebih 472 definisi Hubungan Masyarakat (Humas), Dr. Rex Harlow dalam bukunya berjudul : *A Model For Public Relations Education for Professional Practices* yang diterbitkan oleh *International Public Relations Association* (IPRA) 1978, menyatakan bahwa definisi dari Humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama. Melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif. Juga bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etik sebagai sarana utama.<sup>2</sup>

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru dalam struktural organisasinya tidak memiliki bidang khusus Hubungan Masyarakat (Humas). Aktivitas kehumasannya dilakukan oleh Kepala BPPMKB dalam mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. Kepala BPPMKB dibantu oleh beberapa kepala bidang dan staf menjalankan fungsinya sebagai humas memikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kepadatan penduduk, kematian bayi dan kematian ibu. Keluarga Berencana adalah usaha untuk menjarangkan anak dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang di sarankan dokter. Program

<sup>1</sup> [www.bppmkb.pekanbaru.go.id](http://www.bppmkb.pekanbaru.go.id) (diakses 04 Mei 2016)

<sup>2</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi* (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KB ini bertujuan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, kematian bayi dan ibu yang tidak diinginkan. Usaha pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran ini karena semata-mata bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kesadaran masyarakat akan adanya program Keluarga Berencana ini masih kurang disebabkan masyarakat masih memegang asumsi banyak anak banyak rezeki, namun masyarakat tidak sadar dengan banyak anak kebutuhan semakin meningkat.

Di Kota Pekanbaru partisipasi masyarakat masih belum maksimal untuk ikut mensukseskan dan melaksanakan program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah akan pentingnya program keluarga berencana di laksanakan. Pemerintah harus secepatnya bertindak mengatasi masalah kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam melaksanakan program keluarga berencana, jangan sampai hal ini menjadi budaya masyarakat, sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan apa tujuan dari program keluarga berencana itu sendiri.

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintah, baik yang bersifat komersil maupun non komersil. Apalagi perusahaan yang berskala besar sangat memerlukan *Public Relations* untuk meningkatkan atau memajukan sebuah perusahaan atau instansi. Artinya : Humas sebagai sumber informasi terpecaya kian terasa pada era globalisasi dan banjir informasi seperti saat ini.<sup>3</sup>

Humas pemerintah berbeda dengan humas non pemerintah pada humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan, kendati demikian humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik publisitas dalam mensosialisasikan kegiatan pemerintah. Humas pemerintah bertanggung jawab dalam mensosialisasikan yang menyangkut kepentingan

<sup>3</sup> Anggoro Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 1.



masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan merespon segala bentuk kegiatan serta program yang direncanakan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, BPPMKB memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi program KB dan sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada BPPMKB, sehingga terjadi hubungan komunikasi timbal balik (*two ways communication*) antara BPPMKB dengan masyarakat untuk saling pengertian. Dalam proses mensosialisasikan program KB kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPPMKB; bukanlah semata-mata hanya sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi lebih dari itu, BPPMKB harus lebih gencar mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program KB.

Untuk itu, BPPMKB Kota Pekanbaru harus melakukan kampanye dan berperan aktif dalam mensosialisasikan segala bentuk program KB agar masyarakat mendapatkan pengertian tentang program keluarga berencana, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap program keluarga berencana yang dilakukan oleh BPPMKB. Maka dari itu jelaslah bahwa keberhasilan dari program KB tidak lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek dalam program KB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul : **Pelaksanaan Fungsi Humas BPPMKB Kota Pekanbaru Dalam Mengkampanyekan Program Keluarga Berencana Kepada Pasangan Usia Produktif Di Kota Pekanbaru.**

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

<sup>4</sup> Widjaja. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta : Rieneke Cipta, 1992), 31.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>5</sup> Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana caranya.
2. Humas atau *Public Relations* menurut kamus *Fund and wagnal American Standard Desk Dictionary* terbitan 1994, istilah Humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak terjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan bahwa Humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan *Management by Objectives*<sup>6</sup> Humas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan bersama.

<sup>5</sup> Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70

<sup>6</sup> Anggoro Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>7</sup>
4. BPPMKB Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.
5. Program KB merupakan Program Pemerintah yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran pada pasangan produktif melalui penggunaan alat kontrasepsi.<sup>8</sup>
6. Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.

### 1.3 Rumusan Masalah

<sup>7</sup> Venus. *Manajemen Kampanye*. (Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2010), 7.

<sup>8</sup> Dokumen BPPMKB Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka penulis hanya mengambil salah satu masalah yang terdapat pada identifikasi masalah, yaitu Pelaksanaan Fungsi Humas BPPMKB Kota Pekanbaru dalam Mengkampanyekan Program KB kepada Pasangan Usia Produktif di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Humas BPPMKB Kota Pekanbaru dalam Mengkampanyekan Program KB kepada Pasangan Usia Produktif di Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### 1. Aspek Akademis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji ilmu komunikasi di bidang Humas yang berminat untuk meneliti masalah yang sama.
- b. Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat selama ini dan menambah khazanah Ilmu Komunikasi khususnya tentang kehumasan.
- c. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana 1 (S.1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

#### 2. Aspek Praktis

- a. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi Humas BPPMKB Kota Pekanbaru dalam Mengkampanyekan Program KB kepada Pasangan Usia Produktif di Kota Pekanbaru.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan, penegasan istilah, permasalahan, tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori , kajian terdahulu dan kerangka piker.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum BPPMKB Kota Pekanbaru.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

### BAB VI : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN